

NATIONAL INTEGRITY IN THE PERSPECTIVE OF DIFFERENT RELIGIOUS MARRIAGE AND SARA ISSUES

Syamsu Ridhuan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk Jakarta 11510

syamsu@esaunggul.ac.id

Abstract

This article comes from research, The Study of the National Integrity as Enrichment of Civic Education in College. The purpose of describing the factors that trigger the failure of the national integrity, the efforts of government and local government, and the implications in the perspective of different religious marriages and SARA issues. Research method using descriptive qualitative design. Research subjects or University of Esa Unggul and members Integrity Nation Forum of DKI Jakarta. Data collection using interview instruments. Data analysis techniques focus group discussion (FGD) and triangulation. The results of research reject the hypothesis of national integrity, failed. Meaning that the national integrity continuous to occur and take place. There are barriers to the through biological marriage, that is : (1) to different ethnic and religious differences, (2) fear not accepted, (3) limitations of encounter. While ideological, political, economic, socio-cultural, defense and security marriage are quite successful. Tolerance, harmonious and mutual respect. The SARA issue is not proven in real action, it only develops in social media (proxy war), and is used for certain political interests. Suggestion : (1) government and local government increase socialization of the national integrity, (2) refining the textbook of civic education with the enrichment and example of the national integrity.

Keywords : *integrity, nation, SARA*

Abstrak

Artikel ini berasal dari penelitian, Studi Pembauran Bangsa sebagai Pengayaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Tujuan mendeskripsikan faktor pemicu kegagalan pembauran bangsa, usaha pemerintah dan pemerintah daerah, serta implikasinya dalam perspektif perkawinan beda agama dan isu sara. Metode penelitian menggunakan rancangan diskriptif-kualitatif. Subjek penelitian mahasiswa Universitas Esa Unggul dan anggota Forum Pembauran Kebangsaan DKI Jakarta. Pengumpulan data menggunakan instrumen interview, teknik analisa data *focus group discussion* (FGD) dan triangulasi. Hasil penelitian menolak hipotesa pembauran bangsa, gagal, Artinya pembauran bangsa tetap terjadi dan berlangsung. Ada hambatan pembauran bangsa melalui perkawinan biologis, yaitu (1) terhadap beda etnis dan beda agama, (2) rasa takut tidak ditemia, (3) keterbatasan perjumpaan. Sedangkan perkawinan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, cukup berhasil. Terjadi toleransi, harmonis dan saling menghargai. Isu sara tidak terbukti dalam tindak nyata, hanya berkembang dalam dunia maya di sosial media (*proxy war*) dan digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Saran (1) pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan sosialisai pembauran bangsa (2) menyempurnakan buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan dengan pengayaan dan contoh pembauran bangsa.

Kata kunci : *pembauran, bangsa, SARA*

Pendahuluan

Artikel ini ditulis dari hasil penelitian, berjudul: Studi Pembauran Bangsa sebagai Pengayaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Penulis mengekstrak hasil penelitian dengan mengambil sebagian isu aktual dan relevan dengan fokus penelitian. Kemudian penulis memberi judul Pembauran Bangsa dalam Perspektif Perkawinan Beda Agama dan Isu SARA.

Berkembangnya isu SARA akhir-akhir ini, dan telah mengusik kehidupan sosial politik bangsa Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh oleh pemerintah Indonesia. Isu SARA ini membuat hilangnya rasa pesaudaraan antara etnis yang berbeda. Baik antara etnis pribumi dengan etnis keturunan, terutama etnis Tionghoa maupun etnis pribumi dengan pribumi sendiri yang berbeda asal suku.

Hilangnya rasa peraudaraan dapat terlihat dari beberapa perilaku sosial, seperti demo anarkis (intoleransi), ujaran kebencian, fitnah, provokasi, intimidasi dalam sosial media, sikap dan perilaku yang memandang rendah suku lain (paham chauvinis), tindakan mengutamakan kelompok sesama etnis dalam berpartisipasi di daerah otonom (eksklusif) dan makin tajamnya kesejangan ekonomi antara etnis pribumi dengan etnis keturunan Tionghoa, menimbulkan sentimen pribadi negatif dan kecemburuan sosial yang makin tidak terkendali. Pelan tapi pasti berdampak pada hilangnya makna pembauran bangsa yang telah dibina bertahun-tahun dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Eksistensi asimilasi dengan wujud perkawinan antar etnis, baik yang beda agama maupun sama agama, seolah-oleh hilang ditelan isu-isu SARA yang makin kuat ditengah-tengah kehidupan berbangsa yang makin individual. Harmonisasi hubungan antar etnis yang berbeda mengalami keretakan, ketidak rukunan dan

saling curiga. Faktor-faktor inilah yang mendorong peneliti membuat hipotesis, bahwa pembauran bangsa telah mengalami kegagalan.

Secara etimologi pembauran kebangsaan berasal dari 2 (dua) kata pembauran dan kebangsaan. Pembauran artinya sama dengan percampuran atau pencampuran (Purwadarminta. 2008 : 99). Pencampuran mengandung makna bahwa ada banyak unsur minimal lebih dari satu unsur menjadi berbaur atau bersatu tanpa ada skat sebagai dinding pemisah, meskipun sesungguhnya terdapat perbedaan dari setiap unsur didalamnya. Ilustrasi ini dapat dianalog dengan bersatunya beragam suku bangsa atau etnis yang berada di wilayah nusantara, menjadi satu kesatuan yang utuh atau terjadi integrasi yang kuat.

Kata kebangsaan berasal dari kata bangsa adalah (1) Kumpulan manusia yang terikat oleh kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi, (2) orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Secara sosiologis bangsa termasuk kelompok paguyuban yang secara kondrati ditakdirkan untuk hidup bersama dan senasib sepenanggungan di dalam suatu negara.

Dalam konteks sosial, pembauran bangsa pada hakikatnya adalah peniadaan sifat-sifat eksklusif kelompok etnik di dalam masyarakat sebagai usaha mencapai kesatuan bangsa (FPK DKI Jakarta, 2017 : 2). Pembauran kebangsaan mempunyai makna yang lebih luas dari pada asimilasi, karena membaur tidak mengandung konotasi menghilangkan ciri-ciri etnis. Membaur lebih kearah mengasosiasi diri dengan masyarakat luas dan “menggawinkan” dirinya dengan masyarakat luas dalam hal ini adalah bangsa.

Ketika menginterpretasi pembauran harus memperhatikan ikhwal keberlangsungan bahwa proses pembauran harus bersifat wajar, natural-tanpa paksaan, yang

tidak kalah pentingnya adalah membaaur itu tidak mutlak berarti pembauran biologis (Birawatniwayan. 2000). Perkawinan yang dianjurkan adalah perkawinan sosial, perkawinan antar golongan minoritas Tionghoa dengan golongan mayoritas Indonesia untuk membangun “Rumah Tangga Indonesia” yang harmonis. Perkawinan yang harmonis tidak bisa didasarkan atas hilangnya identitas dari salah satu partner perkawinan. Harus dijalin sifat toleransi dan kesungguhan dalam menciptakan keharmonisan hubungan.

Pembauran kebangsaan mampu menciptakan integrasi bangsa yang kuat dan utuh. Sebab dapat mengedalikan konflik sosial dan penyimpangan sosial atau pengkhianatan terhadap bangsa dan neagara. Integrasi diperlukan agar bangsa tidak bubar meskipun menghadapi berbagai acaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan negara. Dewasa ini acaman yang paling kuat terhadap pecahnya integrasi dan kegagalan pembauran kebangsaan adalah adanya *proxy war* yang makin hari spektrum perangnya makin meluas.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Asal mula Pendidikan Kewarganegaraan, berawal dari penjelamaan mata kuliah Kewiraan, yang mempunyai subsatansi bela negara dan cinta tanah air. Dalam perkembangannya pembelajaran pendidikan bela negara diperkaya dari dua sumber pengetahuan, *pertama*, dari pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan *kedua*, pembelajaran Kewiraan. Keduanya dilaksanakan secara terpisah pada jenjang pendidikan yang berbeda juga. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) diberikan kepada siswa mulai dari jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) sampai dengan jejang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), sedangkan Kewiraan yang lazim disebut Pendidikan

Pendahuluan Bela Negara (PPBN) Tahap Awal, diberikan pada jenjang S1 Pendidikan Tinggi.

Seiring dengan perkembangan zaman, terutama tutntuan reformasi di segala bidang. Akhirnya eksistensi pembelajaran dari kedua subsatansi mata pelajaran ini, dievaluasi dan direvisi total. Sebagai konsekwensi logis terjadi beberapa penyederhanaan bobot materi pembelajaran, karena harus disesuaikan dengan keadaan, situasi, kondisi dan aspirasi masyarakat yang berkembang pada awal era reformasi tahun 1998. Hasilnya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) berubah nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) sampai dengan SLTA, sedangkan Kewiraan berubah nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan yang di berikan di Perguruan Tinggi (Ridhuan. 2016 : 4).

Rekrutmen tenaga pendidik, para guru yang mengampuh mata pelajaran PMP berasal dari guru kelas untuk jenjang pendidikan SD dan guru mata pelajar yang berlatar belakang pendidikan S0 atau S1 bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) atau Pendidikan Moral Pancasila, untuk jenjang pendidikan SLTP dan SLTA. Bagi Para dosen Pengampuh mata kuliah Kewiraan rekrutmen awalnya adalah berasal dari kalangan militer (TNI) dan polisi. Hal itu mengingat masih sangat terbatasnya sumber daya dosen perguruan tinggi yang berbasis pengetahuan pendidikan kewiraan (pendidikan pendahuluan bela negara).

Namun seiring dengan perkembangan zaman, dirasa kebutuhan tenaga dosen Kewiraan sangat diperlukan guna mengantisipasi dan memenuhi kekurangan dosen pengampuh mata kuliah ini. Menyikapi kondisi seperti itu, maka Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Jakarta bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (waktu itu), pada akhir tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an membukakan program pendidikan Calon Dosen Kewiraan atau disingkat SUSCADOSWIR yang terbuka bagi kalangan perwira TNI, Polisi dan Dosen PTN/PTS di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat untuk dididik di Lemhanas menjadi Dosen Kewiraan.

Maksud dan tujuan diadakannya *crash* program SUSCADOSWIR-LEMHANAS adalah selain untuk menambah dan memenuhi kebutuhan dosen Kewiraan di PTN/PTS, juga untuk menghilangkan anggapan (*image*) bahwa pembelajaran Pendidikan Kewiraan sebagai betuk doktrin militerisasi warga negara. Mengingat para staf pengajar berasal dari kalangan TNI dan Polisi. Dengan keberadaan dan hadirnya para dosen sipil dari lingkungan perguruan tinggi, diharapkan mahasiswa dapat memahami sepenuhnya bahwa Pendidikan Kewiraan bukanlah pendidikan militerisasi melainkan pendidikan pendahuluan bela negara yang wajib dipelajari oleh setiap warga negara. Bukanlah sebagai doktrin wajib militer. Keniscayaan setiap warga negara berhak dan wajib bela negara merupakan amanat UUD NRI Tahun 1945 pasal 30 ayat (1). Oleh sebab itu semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali harus melaksanakan hak dan kewajibannya membela negara Indonesia.

Image dan kritik terhadap keberadaan pendidikan Kewiraan selalu ada, terutama berasal dari kalangan *ilmuwan dan praktisi* yang belum mengetahui secara menyeluruh dan mendalam tentang duduk persoalan dan esensi dari pengetahuan pendidikan kewiraan. Tidak lain adalah sebagai pembangun karakter bangsa dan pembentuk kepribadian mahasiswa menjadi ilmuwan dan/atau profesional yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air dan patriot sejati. Begitu kuatnya arus kritik ditambah

dengan berbagai hal kepentingan dalam era reformasi, maka pendidikan kewiraan disederhanakan dan dirubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan.

Dari sini banyak sekali terjadi distorsi baik terhadap Pendidikan Kewiraan maupun terhadap Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Pendidikan Kewiraan di-*merger* menjadi satu dengan Pendidikan Moral Pancasila. Sehingga berubah nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang diberikan dan diajarkan sejak duduk di bangku SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Secara kasat mata, ada beberapa esensi dasar pengetahuan yang berhubungan dengan moral Pancasila ditiadakan, begitu pula dengan beberapa bahan pembelajaran Kewiraan makin disederhanakan. Semua pengetahuan yang dipandang tidak relevan lagi dengan kondisi objektif zaman harus segera ditiadakan, seperti materi pembelajaran yang berkaitan dengan keberadaan “dwi fungsi ABRI” langsung dihilangkan. Namun pada kenyataannya bukanya itu saja, melainkan beberapa esensi dasar pengetahuan bela negara juga ikut tergerus seiring dengan penyederhanaan materi pembelajaran pendidikan pendahuluan bela negara (Kewiraan).

Hasilnya tentu sangat terasa, semenjak adanya reformasi 1998 pengamalan terhadap nilai-nilai moral Pancasila makin menipis, para generasi muda hampir tidak paham tentang apa itu nilai-nilai Pancasila bahkan ada kalangan artis yang “menghina” burung Garuda Pancasila. Pendek kata, nilai-nilai Pancasila kian merosot tajam seiring dengan berjalanya reformasi dan makin terbuka lebar arus informasi, globalisasi dan demokratisasi. Begitu pula terhadap tatanan pendidikan pendahuluan bela negara (Kewiraan) makin tipis pemahaman terhadap cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara.

Keadaan seperti itu, membuat pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah-langkah (*goodwill*) kebijakan untuk *back to basic* dengan nawa cita revolusi mentalnya. Dimana Pendidikan Bela Negara merupakan *coditio sine quanon* yang harus tampil sebagai bekal pengetahuan dasar bela negara. Esensi pengetahuan bela negara dikembalikan pada fokus yang sebenarnya agar dapat dipergunakan oleh setiap warga negara dalam pembelaan negara. Ingat pendidikan bela negara, bukan wajib militer dan bukan pula militerisasi melainkan berupa pengetahuan dan kemampuan awal bela negara dengan latar pendekatan ilmiah.

Setelah *resuffle* jilid II kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Yusuf Kalla tanggal 27 Juli 2016, terjadilah pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang membawa implikasi terhadap perubahan kebijakan dalam dunia pendidikan. Satu diantaranya adalah yang berkaitan dengan pembelajaran pendidikan bela negara. Dimana untuk menjamin terpenuhinya kompetensi pengetahuan morlitias Pancasila dan kewiraan (bela negara), akhirnya kedua subsatnasi mata pelajaran tersebut kembali di gabung (*merger*) menjadi satu, yaitu bernama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tentu terhadap materi-materi pembelajaran yang dipandang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi objektif serta kebijakan pembangunan nasional harus ditiadakan, sebaliknya yang masih relevan tetapi sebelumnya ditinggalkan, harus dikembalikan lagi paling tidak diberikan intisari dari topik pembelajaran yang dibutuhkan dalam rangka mencapai dan menguatkan kompetensi pembelajaran pendidikan bela negara.

Metode Penelitian

Desain penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tiga fokus dalam penelitian, yaitu (1) faktor-faktor yang

diduga dapat menjadi pemicu kegagalan implementasi pembauran kebangsaan, (2) usaha dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah dalam sosialisasi program pembauran bangsa, (3) penelaahan materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, terhadap pokok bahasan yang relevan dengan pengetahuan pembauran kebangsaan.

Lokasi Penelitian di Jakarta dan Bekasi Jawa Barat, lokasi di Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta dan Bekasi Jawa Barat, serta Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi DKI Jakarta. Waktu Penelitian selama 4 (empat) bulan. Sumber data penelitian dari data primer, langsung dari responden mengalir bagai bola salju (*snowball*), data sekunder, diambil referensi buku, jurnal dan informasi relevan dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data, yaitu wawancara usaha pengumpulan data informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan, secara lisan untuk dijawab secara lisan pula dengan cara langsung (*face to face relationship*) antara peneliti (*interviewer*) dengan sumber informasi (*interviewee*) dalam hal ini responden penelitian. Teknik analisis data, yaitu *Focus Group Discussion* (FGD) dan Triangulasi. Kedua teknik analisis ini. Digunakan untuk mengdiagnosa, mengkonfirmasi dan menghubungkan-hubungkan antara satu data kualitatif yang dari sumber data primer *interviewee* satu dengan yang lainnya. Jika terjadi kesamaan pendapat atau ada irisan pendapat yang sama, maka data kualitatif yang dianalisis sama itu dapat menjadi postulat. Artinya bahwa postulat dari beberapa proposisi yang ada irisan data kualitatif yang sama, menjadi aksioma yang dapat digiring kepada simpulan hasil analisis data.

Hasil dan Pembahasan

Secara keseluruhan hasil penelitian berkaitan dengan (1) faktor-faktor yang diduga menjadi pemicu kegagalan

implementasi pembauran bangsa, antara lain makin berkurangnya intensitas penerapan nilai-nilai pembauran (toleransi, saling menghargai, dan lainnya), adanya pengaruh *proxy war* melalui sosial media, terjadi perubahan sosial dan budaya, lunturnya semangat nasionalisme kebangsaan Indonesia. (2) usaha pemerintah dan pemerintah daerah dalam ikhwalsosialisasi program pembauran bangsa, dan (3) penelaahan materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yang relevan dengan pokok bahasan pembauran kebangsaan.

Pembauran dalam Persepsi Perkawinan Biologis

Data kualitatif persepsi perkawinan biologis pembauran bangsa di Indonesia, mendeskripsikan bahwa pembauran dalam arti perkawinan biologis antar etnis pribumi Indonesia, sudah cukup berhasil. Tidak ada pembatasan antara satu etnis dengan etnis lain untuk membina rumah tangga bahagia, yang penting saling mencintai. Perkawinan antar etnis pribumi dan etnis turunan warga negara Indonesia, mengalami hambatan dan cenderung lambat.

Program pemerintah tentang pembauran antar etnis Tionghoa dan etnis pribumi, belum berhasil secara kuantitatif. Fakta ini menguatkan hipotesis peneliti yang menyatakan bahwa perkawinan biologis antara etnis turunan Tionghoa dan etni pribumi, gagal. Faktor-faktor yang memicu kegagalan adalah (1) perbedaan keyakinan, agama dan kepercayaan. Etnis Tionghoa pada umumnya berkeyakinan dan/atau agama Kristen, Kong Hu Cu, dan Budha, sangat sedikit yang beragama Islam. Sedangkan etnis pribumi mayoritas Islam. (2) ada anggapan dan perasaan dari etnis Tionghoa ketakutan dan kurang nyaman bila bergaul dengan etnis pribumi, dan (3) kesempatan adanya pertemuan antar etnis Tionghoa dengan etnis pribumi terbatas, sebagai akibat kesibukan masing-masing dalam memenuhi kebutuhan ekonomis.

Berdampak kurang ada kesempatan menjalin hubungan cinta, menuju jenjang pernikahan.

Kegagalan implementasi pembauran bangsa, akibat makin berkurangnya intensitas penerapan nilai-nilai pembauran (toleransi, saling menghargai, dan lainnya), pengaruh *proxy war* melalui sosial media, terjadi perubahan sosial dan budaya, lunturnya semangat nasionalisme kebangsaan Indonesia. Fakta ini menggiring argumentasi bahwa pembauran tidak terjadi secara maksimal akibat dari rendahnya toleransi, kurangnya perilaku saling menghargai dan kesediaan menikah beda agama tanpa paksaan. Begitu pula bila dilakukan *cross cek*s terhadap keberadaan pengaruh *proxy war* melalui sosial media, perubahan sosial budaya, makin lunturnya semangat nasionalisme kebangsaan Indonesia Memberikan jawaban yang argumentatif bahwa kegagalan asimilasi atau pembauran dalam arti perkawinan secara biologi antar etnis turunan Tionghoa dengan etnis pribumi sebagai konsekwensi ada perasaan takut tidak diterima oleh etnis pribumi, merasa kurang nyaman bergaul dengan etnis pribumi dan kurang adanya kesempatan pertemuan langsung atau *face to face*.

Perubahan sosial budaya terjadi sangat cepat, masing-masing etnis lebih asyik menggunakan sosial media sebagai pengganti pertemuan langsung, media sosial sering dipergunakan sebagai pengganti kehadiran “komunitas atau etnis” dalam bersilatuhrahmi. Dalam waktu yang bersamaan, muncul juga berita-berita di sosial media yang berkonotasi *proxy war*: propokasi, ancaman atau intimidasi yang terbukti membuat tergerusnya semangat kebangsaan dan melunturkan nilai-nilai nasionalisme Indonesia. Fakt-fakta kualitatif inilah yang memberikan *justifikasi* bahwa program pembauran atau asimilasi perkawinan secara biologis dipandang gagal.

Pembauran dalam Persepsi Perkawinan Ideologis, Politis, Ekonomi Dan Sosial Budaya

Persepsi perkawinan ideologis, politis, ekonomi dan sosial budaya adalah kesadaran yang tanpa paksaan dari etnis turunan, misalkan etnis turunan Tionghoa untuk mengakui, menerima, melaksanakan dan membela eksistensi ideologi Pancasila, sistem politik, ekonomi dan sosial budaya negara Indonesia. Data kualitatif, bahwa komunitas etnis turunan Tionghoa mengakui, menerima, melaksanakan dan membela eksistensi ideologi Pancasila, sistem politik, ekonomi dan sosial budaya negara Indonesia. Mereka (etnis Tionghoa) sudah hidup di tanahair dan telah menjadi warga negara Indonesia yang sah, sehingga siapapun orang dan dari turunan apapun, mempunyai kewajiban setia, patuh dan taat serta mengabdikan kepada negara Indonesia. Apapun pekerjaan dan profesinya, baik sebagai pegawai aparatur pemerintah, karyawan swasta, TNI, Polri, pebisnis, wiraswasta, petani, nelayan pedagang, buruh dan yang lainnya.

Pembauran dalam Perspektif Sosial Media dan Isu SARA

Hasil data penelitian kualitatif menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari di dunia kerja, pendidikan dan masyarakat, sebutulnya sudah hampir tidak ada gesekan-gesekan yang berarti dalam hal perbedaan etnis. Isu SARA yang marak di media sosial adalah murni karena kepentingan politik yang bagi mengangkat isu SARA. Tujuannya untuk mengadu domba masyarakat, namun setelah kepentingan politik ini usai, masyarakat akan menjadi rukun kembali.

Penyebab utama SARA adalah kesenjangan ekonomi. Ada jurang perbedaan besar antara warga Pribumi dengan warga keturunan Tionghoa, Kaukasian, India dan Arab yang menetap dan berbisnis di Indonesia. Warga Tionghoa hidup berbaur sebagai warga

sejak zaman penjajahan, ikut berjuang bersama dalam memerangi penjajah dan sudah diakui menjadi bagian warga Indonesia sejak dulu, sehingga kesenjangan sosial yang menjadi perbandingan adalah antara warga pribumi dengan warga keturunan Tionghoa.

Maraknya kasus diskriminasi terhadap etnis tertentu baik di dunia maya dan di dunia nyata melunturkan sifat toleransi terhadap sesama. Isu SARA tidak pernah dibawa dalam pertengkaran perbedaan etnis. Murni disebabkan oleh pengetahuan yang minim, sikap gaya-gayaan dan ikut-ikutan membela suku/agamanya atau membela si A atau si B tanpa menyelidiki secara betul seluruh kebenarannya. Warga dunia maya hanya berani mengungkapkan kebencian yang membabi-buta melalui media sosial padahal kenyataan yang terjadi di dunia nyata tidak ada pertengkaran antar etnis seperti yang terjadi di dunia maya. Semuanya baik-baik saja seperti tidak terjadi apa-apa. Dunia maya atau media sosial murni hanya karena gaya-gayaan, ikut-ikutan dan pada dasarnya bukan karena ada perasaan benci. Hal itu terjadi hanya semata untuk provokasi.

Isu SARA menjadi sangat panas di dunia maya, murni disebabkan oleh adanya kepentingan politik, lemahnya iman dan pengetahuan serta mudah tersulutnya emosi warga Indonesia dengan isu-isu SARA yang dihembuskan itu. Dalam hal pernikahan berbeda etnis dan suku di Indonesia sebenarnya sudah berhasil dalam mewujudkan pembauran kebangsaan, namun memang harus diakui bahwa keberhasilan pernikahan antara etnis/suku Pribumi dengan sesama etnis/suku Pribumi lebih berhasil diterima dan berbaur dibandingkan dengan pernikahan etnis Tionghoa dengan etnis/suku Pribumi. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan cara pandang, cara berpikir, kebudayaan, kepercayaan dan sifat antara warga etnis Pribumi dengan warga keturunan etnis Tionghoa.

Pembauran dalam Perspektif Keluarga Beda Agama

Dalam pernikahan antar etnis tetap ada jarak (*gap*) antara keluarga besar pihak perempuan dan laki-laki. Sekalipun dalam pernikahan antara etnis Pribumi dengan etnis Pribumi juga pasti tetap ada jarak (*gap*) antara para keluarga besar masing-masing. Karena sekalipun dari etnis yang sama namun perbedaan suku juga terdapat perbedaan sifat dan kebudayaan, misalnya suku Jawa dengan suku Flores. Tetapi kerukunan dalam pernikahan semuanya tergantung dari pribadi dan sifat masing-masing pasangan dan pihak keluarga besar masing-masing pasangan. *Cek-cok* (perselisihan) dalam pernikahan bukan disebabkan oleh perbedaan etnis, pertengkaran tidak pernah membawa perbedaan etnis. Pernikahan dari etnis yang sama juga sering terjadi pertikaian antar suami dan istri.. Namun memang tidak dipungkiri para orangtua/keluarga besar sebenarnya menginginkan menantu dari etnis yang sama karena alasan perbedaan cara berpikir, kebudayaan dan sifat.

Pernikahan antar suku yang berbeda sebenarnya cukup berhasil membaurkan rasa kebangsaan, karena di dalam keluarganya yang berbeda suku, dalam hal cara berpikir dan sifat antara suku Jawa dan Manado tidak ada masalah antar etnis dan justru meningkatkan rasa toleransi yang tinggi. Namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan antar etnis Pribumi dan Tionghoa memang lebih sulit diterima, karena faktor alasan sejarah yaitu memilah-milah dan membedakan pelayanan, perlakuan dalam hukum dan bermasyarakat antara etnis Eropa, Timur asing, Tionghoa dengan pribumi yang terbawa hingga kini. Perbandingan antara etnis Tionghoa dengan pribumi yang semakin meruncing, secara historis memang diciptakan oleh penjajah Belanda untuk memecah-belah bangsa Indonesia.

Dari seluruh etnis di Indonesia yakni etnis Kaukasian, India, Arab,

Tionghoa dan Pribumi, memang harus diakui yang seringkali menjadi perbandingan hanyalah antara etnis Pribumi dengan etnis Tionghoa. Hal ini disebabkan karena nenek moyang warga keturunan Tionghoa telah berbaur sejak dahulu dengan warga asli etnis pribumi. Warga keturunan Tionghoa telah hidup bermasyarakat, beranak-cucu dan ber-bahasa Indonesia. Akibat kesenjangan ekonomi baik antara warga asli etnis pribumi dan warga keturunan etnis Tionghoa, maka tercipta kesenjangan sosial yang menciptakan jarak antara kedua etnis tersebut. Jarak yang tercipta ini menimbulkan rapuhnya hubungan emosional antara keduanya, sehingga sedikit saja tersulut akan menimbulkan perasaan benci yang luar biasa. Hal ini pernah dan sering dijadikan senjata oleh para oknum politik untuk memecah belah bangsa demi tujuan politiknya.

Pasangan berbeda etnis/suku yakni pasangan Jawa-Tionghoa dan Jawa-Manado, tidak ada masalah yang menyangkut etnis dalam pernikahan berbeda etnis/suku, justru menciptakan rasa toleransi dalam kehidupan berkeluarga baik dalam hubungan pasangan tersebut maupun oleh keluarga besar kedua belah pihak. Namun memang harus diakui bahwa kedua orangtua masing-masing pasangan sebenarnya lebih setuju apabila anak mereka menikah dengan etnis/suku yang sama, dikarenakan alasan perbedaan cara pandang, cara berpikir, kebudayaan, kepercayaan dan sifat.

Pengalaman menarik salah seorang keturunan dari hasil perkawinan beda etnis sekaligus beda agama. Sejak TK, SD, SMP di ikutkan dalam agama Islam, namun setelah SMP dan SMA, keluarganya membebaskan memilih agama yang akan dijalankan. Ditekankan agar bersungguh-sungguh dalam agama yang akan di pilih. Beda agama bukan berarti harus mengikuti salah satu agama keluarga tetapi benar-benar dari hati nurani sendiri. Yang

membuat menarik adalah saat ayah puasa dibulan Ramadhan, ibu dan anak-anak ikut dalam puasa. Saat ibu merayakan natal, ayah dan anak-anak juga ikut natal. Pembauran tanpa ada rasa ada egois yang berlebih. Harus bisa menghargai dan toleransi dalam kehidupan beda agama, beda suku, beda golongan. tidak dipermainkan oleh oknum yang mau pecah-belah. Contoh banyak berita hoax dan provokasi media sosial.

Kesimpulan

Pembauran kebangsaan dalam arti biologis sudah berlangsung sejak dulu. Namun ada hambatan yang berarti dalam bidang agama/keyakinan dan paham kebangsaan yang sempit (*chauvinis*). Sedangkan toleransi dan harmonisasi dalam keluarga beda etnis dan beda agama tidak menjadi faktor penghambat pembauran. Pertengkaran dalam keluarga beda etnis dan agama, dan/atau sudah satu agama bukan disebabkan faktor asal-usul etnis, lebih disebabkan oleh faktor ekonomi.

Dalam persepsi pembauran ipoleksosbud pernikahan beda etnis antar pribumi, beda agama serta beda etnis pribumi dengan etnis Tionghoa meningkatkan sikap toleransi yang tinggi, tercipta hubungan harmonis serta terjadi adaptasi. Dapat bekerjasama dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan memahami serta dapat melaksanakan nilai-nilai dari Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.

Isu SARA yang marak di media sosial, murni dari adanya kepentingan politik tertentu. Tujuan untuk mengadu domba masyarakat, agar timbul kebencian terhadap etnis Tionghoa. Secara historis diciptakan penjajah Belanda agar Indonesia terpecah belah.

Usaha pemerintah dan pemerintah daerah sosialisasi program pembauran bangsa, dilakukan di sekolah, masyarakat dan ditempat kerja. Serta sosialisasi melalui

media, tetapi tidak secara khusus dan tidak berlangsung terus-menerus.

Hasil penelaahan materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, terhadap pokok bahasan yang relevan dengan pengetahuan pembauran bangsa, ditemui ternyata bahan pengayaan dan contoh dari hasil penelitian sangat minim.

Daftar Pustaka

- BPS. (2010). *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- FPK DKI Jakarta. (2018). *Program Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) DKI Jakarta Periode 2016-2021*. Jakarta : Kesbangpol DKI Jakarta.
- <https://birawatiniwayan.wordpress.com>.
(diakses tanggal 10 Agustus 2017)
- Lemhanas. (1997). *Wawasan Nusantara*. Jakarta : Kerjasama Penerbitan PT. Balai Pustaka dan Lemhanas.
- Lemhanas. (1998). *Wawasan Kebangsaan Menuju Indonesia Baru*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lemhanas. *Kewiraan Untuk Mahasiswa*. Jakarta : Kerjasama Penerbitan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud dan PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, J Lexy. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Pusat Bahasa Indonesia. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Ridhuan. Syamsu. (2015). *Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Nasional Pencerdasan Bela Negara*.

Makalah disajikan dihadapan
Direktur Bela Negara dan Staf
Terkait Ditjen Potensi Pertahanan
Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia. Jakarta. 9 Juli 2105.

Ridhuan. Syamsu. (2016). *Cerdas Bela
Negara : Pendidikan
Kewarganegaraan dan Pancasila.*
Jakarta : NFA.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian
Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D.* Bandung :
Alfabeta

Syarbaini. Syahril dan Wahid. Aliaras.
(2015). *Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan.* Jakarta :
PAMU Universitas Esa Unggul.